

MEKANISME PENGANGKATAN PEMIMPIN DALAM SEJARAH POLITIK UMAT ISLAM

Nur Hafizah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: nurhafizahhh15@gmail.com

Cita Suci

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: citasuci2019@gmail.com

Anzalika Putri Rahmadani

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: anzlkputri332@gmail.com

Taufik Kurniawan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: Kurniawant822@gmail.com

Muhammad Firmansyah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: muhammad.firmansyah11222@gmail.com

Received:

Accepted:

Abstract

This study explores the mechanisms of leadership succession in the political history of the Islamic ummah, tracing the transition of leadership from the period of the Rightly Guided Caliphs (Khulafā' al-Rāshidīn) to the shift toward monarchical systems. Using a qualitative approach and literature review method, this research examines both classical Islamic texts and contemporary academic works. The findings reveal that there was no single model of leadership selection in Islamic history. Instead, various methods such as limited consultation, direct appointment, and council-based decisions were employed. Fundamental principles such as shūrā (consultation), amānah (trust), and justice served as the core values in these processes. Furthermore, Islamic leadership is shown to encompass not only political and administrative dimensions but also moral, spiritual, and transcendental responsibilities as a divine trust. This study contributes to the discourse of fiqh siyasah and offers insights into leadership models in Islam that are contextually relevant to modern challenges.

Keywords: Islamic Leadership, Islamic Political History, Fiqh Siyasah

PENDAHULUAN

Kepemimpinan merupakan elemen vital dalam struktur sosial dan politik umat manusia. Dalam perspektif Islam, kepemimpinan (*al-imamah* atau *al-khilafah*) tidak hanya dilihat sebagai jabatan administratif, tetapi merupakan amanah ilahiyah yang sarat tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual. Islam tidak menanggalkan urusan politik sebagai bagian terpisah dari agama, melainkan mengintegrasikannya dalam kerangka nilai-nilai tauhid, keadilan, dan kemaslahatan. Oleh sebab itu, diskursus mengenai mekanisme pengangkatan pemimpin dalam sejarah politik Islam tidak dapat dilepaskan dari fondasi normatif (*nash*) serta praktik historis yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dan para penerusnya.

Secara historis, sejak wafatnya Rasulullah SAW, umat Islam dihadapkan pada tantangan besar: menentukan bentuk dan mekanisme kepemimpinan baru tanpa petunjuk eksplisit dalam *nash*. Hal ini memunculkan dinamika politik pertama dalam sejarah Islam yang ditandai oleh peristiwa di *Saqifah Bani Sa'adah*, ketika Abu Bakar As-Siddiq dipilih secara musyawarah terbatas oleh para sahabat. Peristiwa ini menjadi rujukan penting dalam perkembangan teori politik Islam karena menunjukkan bahwa umat Islam menggunakan ijtihad kolektif dalam menentukan pemimpin¹. Dari sinilah muncul diskursus panjang mengenai legitimasi kekuasaan, sumber otoritas, serta metode pemilihan dan pengangkatan pemimpin yang sah menurut syariat.

Kajian-kajian kontemporer menunjukkan adanya varian pendekatan dalam memahami dan merumuskan model kepemimpinan Islam. Penelitian oleh Siti Basyariah (2009) menunjukkan bahwa Islam mengenal tiga konsep utama dalam kepemimpinan yakni *imarah*, *imamah*, dan *khilafah*, yang masing-masing memiliki karakteristik dan cakupan tersendiri. *Khilafah*, misalnya, lebih menekankan pada kepemimpinan umum umat Islam secara kolektif, sementara *imamah* sering diidentikkan dengan otoritas spiritual yang berkembang dalam wacana Syiah.²

Sementara itu, Syafiq A. Mughni³ menyoroti bagaimana pembentukan kepemimpinan Islam di masa Khulafaur Rasyidin tidak mengikuti satu pola baku. Abu Bakar dipilih melalui konsensus terbatas, Umar bin Khattab ditunjuk langsung oleh Abu Bakar, sedangkan Usman bin Affan dipilih melalui tim formatur (*ahl al-halli wa al-'aqd*), dan Ali bin Abi Thalib dibai'at di tengah situasi krisis

¹ Syafiq A. Mughni, *Sejarah Sosial Umat Islam* (Yogyakarta: LKiS, 2006), hlm. 48–50.

² Siti Basyariah, "Konsep-konsep *Imarah*, *Khalifah* dan *Imamah*: Kajian Kritis Historikal tentang Sistem Pemerintahan dalam Islam," *Jurnal Ilmiah Sintesa*, (2009), hlm. 30.

³ *Ibid.*, 31

politik. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satu mekanisme tunggal yang diadopsi, melainkan prinsip-prinsip umum seperti syura, amanah, dan keadilan yang menjadi landasan utama.

Lebih lanjut, Nelly Fazillah⁴ menekankan bahwa konsep kepemimpinan Islam harus dipahami sebagai sistem nilai yang holistik. Kepemimpinan tidak hanya berorientasi pada hasil atau efektivitas administratif, melainkan harus memenuhi dimensi etis dan transendental. Ia menggarisbawahi pentingnya integritas moral, kapasitas intelektual, dan komitmen terhadap prinsip keadilan dalam figur seorang pemimpin, yang sekaligus menjadi instrumen pelaksana kehendak ilahi di muka bumi.

Namun demikian, belum banyak penelitian yang secara eksplisit menelusuri mekanisme pengangkatan pemimpin dalam sejarah Islam secara kronologis dan komparatif, dari masa Khulafaur Rasyidin ke sistem monarki dinasti, dengan pendekatan yang menggabungkan dimensi historis, normatif, dan sosiopolitik. Padahal, pemahaman yang mendalam terhadap proses transisi dan transformasi ini penting untuk menjawab tantangan kontemporer umat Islam dalam mencari model kepemimpinan yang otentik, kontekstual, dan relevan dengan tuntutan zaman.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mekanisme pengangkatan pemimpin dalam sejarah politik umat Islam, dengan menelaah proses-proses politik dan teologis yang terjadi sejak wafatnya Rasulullah SAW hingga berkembangnya sistem monarki. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemikiran politik Islam yang tidak hanya normatif-teologis, tetapi juga historis-empiris.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*literature review*), yaitu dengan mengkaji dan menganalisis berbagai sumber literatur primer dan sekunder yang relevan dengan topik kepemimpinan dalam Islam. Metode ini digunakan untuk menggali informasi mendalam tentang dinamika pengangkatan pemimpin dalam sejarah politik umat Islam, mulai dari masa Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, hingga bentuk-bentuk kepemimpinan berikutnya.

⁴ Nur Fazillah, "Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Islam," *Journal of Education Science and Teaching Learning*, Vol. 3, No. 1 (2023), hlm. 129–130.

Sumber primer yang digunakan mencakup kitab-kitab klasik karya ulama terkemuka seperti *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah* karya Imam Al-Mawardi, *al-Shahifah al-Siyasiyyah* serta literatur hadis dan tafsir yang memuat prinsip-prinsip dasar tentang amanah, musyawarah, dan keadilan dalam kepemimpinan. Sementara itu, sumber sekunder meliputi artikel jurnal, buku akademik, dan hasil penelitian kontemporer yang telah diterbitkan secara nasional maupun internasional.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menelaah isi literatur untuk memahami dan memaparkan fakta-fakta historis serta menafsirkannya berdasarkan prinsip ajaran Islam. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menyusun narasi yang utuh dan koheren tentang mekanisme pengangkatan pemimpin dalam konteks sejarah Islam, serta memberikan refleksi kritis terhadap relevansinya di era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip-Prinsip Politik dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara

Agama Islam merupakan ajaran yang komprehensif, mencakup beragam sistem seperti sosial, ekonomi, pemerintahan, dan politik. Karena itu, Islam dipandang sebagai agama yang menawarkan banyak aspek dalam ajarannya, termasuk terkait dengan pemerintahan dan politik. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk mengacu pada sistem pemerintahan yang sejalan dengan ajaran Islam.⁵ Sayyid Qutub, seorang penulis tafsir Al-Qur'an, menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan sangat lengkap sebagai petunjuk hidup, tidak hanya mengenai aspek moral dan ibadah, tetapi juga meliputi sistem politik, karakteristiknya, struktur sosial, dan sistem ekonomi, serta lainnya. Dengan demikian, Islam dianggap sebagai agama yang menyeluruh dalam mengatur kehidupan manusia di semua sektor, sehingga dikenal sebagai agama yang utuh. Kesempurnaan ini tentunya didukung oleh seperangkat peraturan yang berdasar pada prinsip-prinsip yang telah ditentukan, baik yang tertulis maupun yang tersirat. Beberapa prinsip tersebut antara lain adalah:

a. Prinsip Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam Islam adalah suatu hal yang harus dipatuhi oleh setiap individu dalam semua aspek, termasuk dalam hal

⁵ Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara, syarah dan pemikiran*, (Jakarta : UI Press, 1999), Him. 117

politik. Ada hadis yang menjelaskan mengenai hal ini diantara lain yaitu:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحكمهم قال نافع فقلنا لأبن سلمة فأنت أمرنا

Artinya: "Dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda jika ada tiga orang didalam perjalanan maka angkatlah menjadi pemimpin satu diantara tiga orang tersebut, lalu kata Nafik kepada Abi Salamah,: Kamulah pemimpin kami."⁶

Terkait dengan prinsip kepemimpinan yang telah disebutkan, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi agar kepemimpinan dapat berjalan efektif. Salah satu syaratnya adalah seorang pemimpin haruslah orang yang dapat diandalkan untuk menunaikan amanah. Amanah di sini berkaitan dengan tanggung jawab sebagai pemimpin dan pelaksana amanah, terutama mengenai prinsip menegakkan keadilan. Seorang pemimpin seharusnya mampu memastikan hukum dan keadilan ditegakkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۝٥٦

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."⁷

Berdasarkan ayat di atas, seorang pemimpin, baik formal maupun nonformal, yang tidak dapat dipercaya, tidak layak untuk diangkat sebagai pemimpin. Sebab, pemimpin yang meragukan integritasnya cenderung melakukan kerusakan.

b. Prinsip Musyawarah

Esensi dari musyawarah adalah memberikan peluang kepada anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang bersifat mengikat, baik berupa peraturan hukum maupun kebijakan politik. Hal ini dapat dimengerti dari istilah yang menggunakan kata syaaw/ir, serta bentuk Imperatif syaawara yang mengimplikasikan bahwa pemimpin masyarakat perlu meminta pendapat dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap isu yang dihadapi. Terdapat banyak ayat yang mendorong para pemimpin untuk menyelesaikan beragam masalah melalui musyawarah, meskipun frasa yang menyebutkan musyawarah itu tampak dalam berbagai kalimat, seperti menggunakan syaawir, syura,

⁶ Abu Daud Sulaiman, *As-Syastani, Sunan Abi Baud*, (Bairut: Dar-Al Fikr, 1994) Hal. 381

⁷ Q.S.An-Nisa (4): 58

fasyawur, dan lain sebagainya. Sebagaimana difirmankan dalam QS. Ali Imran(3):159 yaitu:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِظَ الْقُلُوبُ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya:” Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”⁸

c. Prinsip Menegakkan Hukum

Tanggung jawab spiritual yang harus diemban oleh para pemimpin negara adalah melaksanakan peraturan Tuhan. Melaksanakan peraturan ini sesungguhnya adalah ciri khas dari orang-orang yang beriman yang diberi kekuasaan di dunia, termasuk diantaranya para Rasul Allah. Mengenai ide keadilan, Mustafa Muhammad Tahhan menyampaikan pemahaman mengenai keadilan dengan mengacu pada penjelasan tentang keadilan yang disampaikan oleh sahabat Umar Ibn Al-Khattab sebagai berikut;

واما العدل فلا رحمة فيه في قريب او بعيد ولا شدة أو في الرخاء

Artinya:” Adil itu tidak mengenal kasihan baik terhadap kerabat dekat maupun kerabat jauh tidak puladalam keadaan kesulitan maupun dalam keadaan sulit.”⁹

d. Prinsip menegakkan kemaslahatan umum

Dalam politik Islam, terdapat aturan yang menyatakan bahwa seorang pemimpin harus mengutamakan kebaikan untuk kepentingan masyarakat. Ini sesuai dengan kaidah fiqh:

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.

Artinya:”Kemaslahatan untuk kepentingan umum harus didahulukan dari pada kesmaslahatan untuk kepentingan pribadi.”¹⁰

Kaidah ini sejalan dengan prinsip lain yang menyatakan bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya seharusnya berdasarkan nilai-nilai yang mengedepankan kesejahteraan rakyat. Jika kita mendalami prinsip-prinsip kepemimpinan dalam politik Islam, tampak bahwa hal ini mudah diungkapkan, namun sangat sulit

⁸ QS. Ali Imran(3):159

⁹ Mustafa Muhammad Tahhan, *Model Kepemimpinan dalam Amal Islami: Studi Tokoh Pergerakan Islam Kontemporer*(Jakarta : Robbani Press, 1997), Hal 10

¹⁰ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh siyasah*(Jakarta: Grafindo Persada, 1995), Hlm. 37

untuk diterapkan. Sebagai contoh, setiap orang dapat dengan mudah berkata bahwa kepentingan umum harus lebih diutamakan dibandingkan kepentingan pribadi, namun untuk mempraktikannya, banyak yang akan menemui kesulitan.¹¹

2. Mekanisme Pengangkatan Pemimpin dalam Sejarah Islam

Islam sebagai agama yang menyeluruh telah mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik dalam hal individu maupun dalam hal pemerintahan. Dalam konteks pemilihan pemimpin negara, Islam juga telah memberikan panduan yang lengkap. Meskipun Al-Qur'an dan Hadits tidak menjelaskan secara langsung tentang mekanisme pemilihan tersebut, namun secara tidak langsung hal ini tercermin dalam kaidah fiqh Islam. Proses pemilihan pemimpin negara dalam Islam tidak diuraikan dengan mekanisme yang tetap, namun dari praktik yang telah disepakati oleh umat Islam, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemilihan tersebut didasarkan pada petunjuk wahyu dan kesepakatan *ijma'* dari para sahabat Nabi.¹² Hal ini terlihat dari proses pemilihan Abu Bakar sebagai Khalifah pertama hingga masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Seluruh mekanisme yang terjadi memberikan wawasan tentang bagaimana metode pemilihan seorang pemimpin negara atau khalifah dalam Islam. Proses pemilihan dan penetapan Abu Bakar.

Siddiq sebagai pemimpin dilakukan melalui cara demokratis. Pencalonannya dilakukan oleh seseorang, yaitu Umar bin Khattab, yang kemudian disetujui oleh semua yang hadir pada saat itu. Hal ini terjadi karena Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam tidak meninggalkan petunjuk tentang siapa penggantinya sebagai pemimpin setelah beliau meninggal. Tampaknya beliau menyerahkan masalah ini kepada komunitas Muslim untuk menentukan pilihan mereka. Ketika Abu Bakar merasa sakit dan mendekati ajalnya, ia berdiskusi dengan para pemimpin sahabat dan kemudian menetapkan Umar bin Khattab sebagai penggantinya, dengan tujuan mencegah adanya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Para pemimpin tersebut ternyata setuju dengan keputusan Abu Bakar mengenai khalifah yang dipilih.¹³

Begitu pula, setelah wafatnya Khalifah Umar, posisinya diambil alih oleh Usman bin Affan. Dalam mencari pengganti, Umar tidak menggunakan cara yang sama seperti Abu Bakar. Ia menunjuk enam sahabat dan meminta mereka untuk memilih salah satu dari mereka sebagai khalifah. Keenam sahabat tersebut adalah Usman bin Affan,

¹¹ Ibn Nujaym, Zayn al-Dīn ibn Ibrāhīm. *Al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*, (Darul Kutub: Al-Umuyah, 1993), Hal 124

¹² A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995) Hlm. 127.

¹³ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayah Ad-Diniyyah* (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah., 1993), hlm. 20

Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Saad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Mereka semua mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. Setelah kematian Umar, enam sahabat ini berdiskusi dan berhasil menunjuk Usman sebagai khalifah. Mengenai kekhalifahan Ali, proses pelantikannya terjadi dalam keadaan yang tidak stabil. Meskipun harus dicatat bahwa dia adalah sahabat terdekat yang masih hidup pada waktu itu dan paling berhak atas kekhalifahan, sayangnya situasi yang ada tidak mendukung. Sayyidina Ali telah dibai'at oleh masyarakat Madinah, kecuali sekelompok sahabat yang menolak.¹⁴ Itulah gambaran singkat mengenai proses transisi kepemimpinan dari satu pemimpin ke pemimpin yang lain. Meskipun terlihat sederhana, tetapi hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan khalifah sebagai kepala negara sudah ada sejak saat itu dalam Islam. Karena pasca itu sudah lain sistemnya yaitu menganut sistem monarki.

3. Konsep Kepemimpinan dalam Islam

Kepemimpinan menurut perspektif ajaran Islam¹⁵ memiliki beberapa istilah yang berasal dari bahasa Arab. Salah satunya adalah Khilafah,¹⁶ yang berasal dari kata khalafa yang berarti menggantikan atau berada di belakang. Ada juga Imamah, yang berarti memimpin dan memberikan arahan. Ulil Amri merujuk pada individu yang memiliki tanggung jawab dan menetapkan hukum di antara masyarakat agar dapat berlaku adil. Selain itu, terdapat istilah wilayah yang berasal dari waliya yang berarti memerintah, menguasai, memberikan kasih sayang, dan membantu. Istilah ini sering kali dihubungkan dengan wali. Dalam konteks Islam, istilah kepemimpinan sangat terkait dengan khalifah, yang secara etimologis berarti pengganti atau wakil. Penggunaan kata khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW merujuk pada istilah amir, yang dalam bentuk jamak disebut umara atau para penguasa. Oleh karena itu, kedua istilah tersebut sering diartikan sebagai pimpinan formal dalam bahasa Indonesia. Namun, jika kita merujuk pada firman Allah yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٠﴾

Artinya:” (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan

¹⁴ Sjazdali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1980) Hlm. 34

¹⁵ Amin Ahmad, *Etika: Ilmu Akhlak*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 60.

¹⁶ Syamsuar Basyariah, “Konsep-konsep Imarah, Khalifah dan Imamah (Kajian Kritis Historikal Tentang Sistem Pemerintahan Dalam Islam)”, *Jurnal Ilmiah Sintesa*, Vol.8, No. 2, Januari 2009: hlm. 30.

nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”(Q.S Albaqarah:30).

Maka posisi non formal seorang khalifah pun tidak bisa dipisahkan lagi. Istilah khalifah dalam ayat ini tidak hanya merujuk pada para khalifah setelah Nabi, tetapi juga sebelum penciptaan Nabi Adam as, yang disebut sebagai khalifah dengan tugas mengelola bumi, serta melaksanakan perintah kebaikan dan mencegah keburukan. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan selalu berkaitan dengan kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai tokoh utama yang harus dijadikan patokan dan contoh yang tepat dalam menentukan ciri khas kepemimpinan ala Islam. Jejak kepemimpinan dalam Islam tercatat sebagai bagian penting dalam sejarah global karena Rasulullah SAW memiliki integritas dan kemampuan luar biasa dalam menggerakkan umat. Konsep Islam sebagai sistem ajaran yang sempurna menganggap kepemimpinan adalah amanah dari Allah SWT, karena sejatinya setiap individu adalah pemimpin, setidaknya pemimpin bagi dirinya sendiri dalam melawan desakan hawa nafsu yang dapat menjurus pada kemaksiatan, dan juga sebagai pemimpin dalam lingkup keluarga. Seorang pemimpin diberikan kepercayaan penuh oleh masyarakat untuk menjalankan amanah dalam membimbing anggotanya menuju arah yang lebih baik.¹⁷ Seperti yang telah diterangkan dalam firman Allah SWT, yang berbunyi:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾

Artinya:”Sungguh, Kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat (untuk menyerukan), “Sembahlah Allah dan jauhilah tagut!” Di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang ditetapkan dalam kesesatan. Maka, berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan (rasul-rasul). (Q.S. an-Nahl: 36).

Dalam surat an-Nahl ayat 36, dijelaskan bahwa tujuan utama para Rasul yang diutus kepada manusia adalah untuk membimbing kaum dan mengantarkan mereka dari kegelapan menuju keyakinan yang benar, yakni menyembah hanya kepada Allah SWT. Saat mengelola organisasi, seorang pemimpin harus dapat mengarahkan dan mengelola organisasi tersebut. Ini berarti bahwa pemimpin harus mampu mendorong perubahan, karena perubahan adalah fokus utama dalam kepemimpinan. Di sini, pada dasarnya, pemimpin harus bertanggung jawab atas semua yang dipimpinnya dalam berbagai

¹⁷ Nur Fazillah., *konsep kepemimpinan dalam perspektif islam*(journal of education science and teaching learning) Vol. 12. No. 1 (2023)Hal 129.

keadaan dan situasi, serta akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya di hadapan Allah SWT.¹⁸

Kepemimpinan efektif akan terwujud apabila dijalankan sesuai dengan fungsinya. Fungsi kepemimpinan berkaitan erat dengan kondisi sosial dalam kelompok atau organisasi yang bersangkutan, yang menunjukkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam konteks tersebut, bukan di luar. Seorang pemimpin perlu berupaya untuk terlibat dalam situasi sosial, baik di dalam kelompok maupun organisasi.¹⁹

Fungsi kepemimpinan adalah fenomena sosial yang berperan sebagai penggerak dan pengatur dari sumber daya manusia, sumber daya alam, semua anggaran, serta fasilitas yang disediakan oleh sekelompok orang yang terorganisir,²⁰ karena hal ini harus terwujud dalam interaksi antar individu di konteks sosial kelompok atau organisasi tersebut. Akan tetapi, dalam teori, fungsi kepemimpinan memiliki dua aspek, yaitu: (1) Aspek yang terkait dengan kemampuan dalam memberikan arahan dalam tindakan atau kegiatan pemimpin untuk mencapai visi dan misi organisasi atau lembaga pendidikan, yang dilihat dari kualitas pembelajaran yang benar-benar dicapai oleh semua anggota lembaga pendidikan; (2) Aspek yang berhubungan dengan seberapa besar dukungan atau partisipasi orang-orang yang dipimpin dalam menjalankan tugas-tugas utama kelompok atau organisasi.

Ada pula tujuan kepemimpinan yang sangat diperlukan oleh masyarakat, baik yang berukuran kecil maupun yang besar, karena keberadaan pemimpin bisa membawa keteraturan dan kebaikan. Sebaliknya, tanpa seorang pemimpin, akan muncul kegelisahan, kekacauan, dan bahkan kehancuran. Oleh karena itu, Islam selalu mengarahkan umatnya untuk hidup di bawah kepemimpinan, seperti imam dalam shalat, imam saat bepergian, pengumpul zakat, pemimpin haji, serta pemimpin dalam rumah tangga, peperangan, dan negara. Menurut Imam Al-Mawardi, mendirikan kepemimpinan dalam sudut pandang Islam merupakan suatu keharusan dalam kehidupan sosial. Ia juga menekankan bahwa kehadiran seorang pemimpin memiliki peranan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan kepemimpinan memiliki dua tujuan yaitu: ((1) Menjadi pengganti misi kenabian untuk menjaga agama. (2) Untuk mengatur urusan dunia. Dengan kata lain, tujuan dari kepemimpinan adalah untuk menciptakan keamanan, keadilan, kesejahteraan, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar,

¹⁸ Nur Fazillah., *konsep kepemimpinan dalam perspektif islam* (journal of education science and teaching learning) Vol. 12. No. 1 (2023) Hal 130

¹⁹ Herman Resito, *Apresiasi sebagai Pemimpin* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 73.

²⁰ Kartono ., *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Bandung :Pustaka Setia.,2000) Hal 13.

melindungi masyarakat, serta mengelola dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh komunitas.²¹

SIMPULAN

Kepemimpinan dalam Islam merupakan sebuah konsep yang tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan etis. Sepanjang sejarah politik umat Islam, mekanisme pengangkatan pemimpin mengalami dinamika yang signifikan, mulai dari sistem musyawarah seperti pada pengangkatan Abu Bakar, penunjukan langsung seperti pada Umar bin Khattab, hingga pembentukan tim syura pada masa Usman bin Affan. Peralihan ini menunjukkan bahwa Islam tidak menetapkan satu bentuk mekanisme tunggal dalam suksesi kepemimpinan, melainkan menekankan pada nilai-nilai universal seperti keadilan, amanah, dan musyawarah.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa konsep kepemimpinan dalam Islam memiliki dasar normatif yang kuat dalam Al-Qur'an, Hadis, serta praktik para sahabat. Prinsip-prinsip dasar yang melandasi sistem pemerintahan Islam bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat, menegakkan hukum, dan menjaga stabilitas sosial. Dalam konteks kekinian, pemahaman terhadap sejarah pengangkatan pemimpin ini sangat penting untuk menjadi bahan refleksi dalam merumuskan sistem kepemimpinan yang relevan, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah amanah besar yang memerlukan kriteria moral, intelektual, dan spiritual yang tinggi. Model dan mekanisme pengangkatan pemimpin dalam sejarah Islam tidak bersifat kaku, melainkan fleksibel, kontekstual, dan terbuka terhadap ijtihad, selama tidak keluar dari prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran politik Islam dan memberikan kontribusi terhadap sistem pembentukan kepemimpinan umat yang lebih ideal di masa kini dan yang akan datang.

²¹ Nawawi Hadari, *Kepemimpinan Menurut Islam* (Yogyakarta: GAMA University Press, 1993), hlm. 34.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. (1975). *Etika: Ilmu Akhlak*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Mawardi. (1993). *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayah Ad-Diniyyah*. Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Basyariah, S. (2009). Konsep-konsep Imarah, Khalifah dan Imamah (Kajian Kritis Historikal Tentang Sistem Pemerintahan Dalam Islam . *Jurnal Ilmiah Sintesa*, 30.
- Fazillah, N. (2023). konsep kepemimpinan dalam perspektif islam. *journal of education science and teaching learning*, 129.
- Fazillah, N. (2023). konsep kepemimpinan dalam perspektif islam . *journal of education science and teaching learning*, 130.
- Hadari, N. (1993). *Kepemimpinan Menurut Islam*. Yogyakarta: GAMA University Press.
- Hasjmy, A. (1995). *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Kartono, K. (2000). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mughni, S. A. (2006). *Sejarah sosial umat Islam*. Yogyakarta: LKiS.
- Nujaym, I. (1993). *Zayn al-Dīn ibn Ibrāhīm. Al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*. Darul Kutub: Al-Umuyah.
- Pulungan, J. (1995). *Fiqh siyasah*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Resito, H. (1992). *Apresiasi sebagai Pemimpin*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sjadzali, M. (1980). *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sulaiman, A. D. (1994). *As-Syastani, Sunan Abi Baud*. Bairut: Dar-Al Flkr.
- Syadzali, M. (1999). *Islam dan Tata Negara, syarah dan pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Tahhan, M. M. (1997). *Model Kepemimpinan dalam Amal Islami: Studi Tokoh Pergerakan Islam Kontemporer*. Jakarta: Robbani Press.
- Syafiq A. Mughni. (2006). *Sejarah Sosial Umat Islam* Yogyakarta: LKiS
- Basyariah, S. (2009) Konsep-konsep Imarah, Khalifah dan Imamah: Kajian Kritis Historikal tentang Sistem Pemerintahan dalam Islam,” *Jurnal Ilmiah Sintesa*, 30.